

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN PENDIDIKAN INKLUSI GENDER

Mahbub Junaidi*
mahbubjunaidi@inidalwa.ac.id

Abstrak

*Multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Istilah “Pendidikan Multikultural” suatu usaha sistematis dan berjenjang, memasukkan isu-isu seperti gender, hubungan antar agama, kelompok kepentingan, kebudayaan dan subkultur, serta bentuk-bentuk lain dari keragaman. Pada akhirnya pendidikan multi kultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman (Teaching Diversity). Pendidikan multi kultural menghendaki rasionalisasi etnis, intelektual, sosial dan pragmatis secara inter-relatif: yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralisme, dan saling menghargai semua orang. Dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. **Pendidikan Inklusi Gender.** Gender adalah sifat behavioral, kultural, dan psikologis yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Pendidikan inklusi ialah program pendidikan yang mengakomodasi seluruh siswa dalam kelas yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, termasuk di dalamnya siswa yang berkelainan. Pendidikan inklusi tidak hanya membicarakan anak berkelainan, tetapi membicarakan semua siswa yang belajar di mana mereka masing-masing mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. dalam pendidikan inklusi gender, perempuan dan laki-laki sama dalam mendapatkan hak pendidikan dan tidak bisa dibedakan. Pendidikan inklusi gender dalam Islam tidak dibedakan dengan alasan apapun, selama perempuan tidak keluar dari kodratnya. Dengan demikian, Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Inklusi Gender mempunyai korelasi tujuan, menjunjung tinggi eksistensi dan urgensi pendidikan tidak membedakan kodrat, kelamin, sifat, bentuk etnis, budaya dan tanpa ada yang menafikan karena itu natural (Sunatullah).*

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Inklusi Gender

A. Pendahuluan

Pendidikan bagi anak generasi Bangsa, sangatlah penting untuk menyongsong generasi Bangsa-negara yang terdidik. Negara dikatakan maju, apabila padat mengikuti globalisasi intelektual kemajuan antar Bangsa. Dalam hal ini tidak mudah untuk menyiapkan generasi yang sesungguhnya tanpa adanya rekonstruksi pendidikan.

Makalah ini memaparkan tentang Pendidikan Multikultural yang diharapkan dapat mengubah cakrawala keilmuan dari monokultural menuju multikultural, dalam

arti meluaskan pandangan seseorang bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri, tetapi kebenaran dapat pula dimiliki oleh kelompok lain. Dengan tujuan untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda.

Makalah ini juga memaparkan Pendidikan Inklusi Gender, mulai dari pengertian pendidikan inklusi, gender dan pendidikan, hambatan dan solusinya. Sehingga dengan adanya kajian dua pendidikan ini, diharapkan dapat: menelaah, mengabil makna dan esensinya. Guna memperbaiki serta memberi sumbangsi positif bagi pemikiran dan kemajuan pendidikan.

B. Pendidikan Multikultural

1. Sejarah Pendidikan Multikultural

Pendidikan Multikultural merupakan gejala baru dalam perjalanan umat manusia yang mendambakan persamaan hak termasuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang (*“Education for all”*). Multikulturalisme bertentangan dengan *monokulturalisme* dan *asimilasi* yang telah menjadi norma dalam paradigma negara dan bangsa (*nation-state*) sejak awal abad Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif istilah *‘monokultural’* juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud (*pre-existing homogeneity*).¹

Sementara itu, Asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru. Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa-Inggris (*English-speaking countries*), yang dimulai di Kanada pada tahun 1971. Inggris, As dan lain-lain, yang sejak usainya perang dunia kedua (II) semakin *“Multicultural”* karena proses migrasi penduduk luar ke Negara-negartesebut.² Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Belanda dan Denmark, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan monokulturalisme. Pengubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subyek debat di Britania Raya dan Jerman, dan beberapa negara lainnya.³

Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias Amerika karena punya akar sejarah

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme.com>.

² Hefner, Robert, *Introduktion: Multiculturalism and citizenship in Malaysia, Singapur, and Indonesia*, (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001)2-3

³ <http://file.upi1.edu/Direktori/Multikultural.pdf.com>.

dengan gerakan hak asasi manusia (HAM), Tilar mengungkapkan, juga karena meningkatnya prulalitas di Negara-negara barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari Negara-negara yang baru mereka ke Amerika dan Eropa,⁴ juga dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak lacakan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an. Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena bermusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang, yang dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh dan orang tua. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multicultural.⁵

Tahun 1980-an agaknya yang dianggap sebagai kemunculan lembaga sekolah yang berlandaskan pendidikan multikultural yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif. James Bank adalah salah seorang Pioner dari pendidikan multikultural. Dia yang membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan. Pada pertengahan dan akhir 1980-an, muncul kelompok sarjana, di antaranya Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan multikultural, memperdalam kerangka kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial.

Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika, Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras dan rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah menjadikan pendidikan multikultural sebagai slogan yang sangat populer pada tahun 1990-an. Selama dua dekade konsep pendidikan multikultural menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-sekolah AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja

⁴Tlaar, Har. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Trasformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: grafindo, 2002), 495-7.,

⁵ <http://www.idonbiu.com/2009/05/implementasi-pendidikan-multikultur.html>

sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.⁶

2. Untuk apa Belajar multikultural

Pendidikan Multikultural sudah merupakan kebutuhan masyarakat modern karena ia dapat merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera, dimana suku bangsa dalam suatu negara atau bangsa-bangsa didunia dapat duduk bersama, saling menghargai dan saling membantu.

Pendidikan multikultural diperlukan untuk meluaskan pandangan seseorang bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri, tetapi kebenaran dapat pula dimiliki oleh kelompok lain.⁷

3. Tujuan Pendidikan Multikultural

Mengutip S. Saptaatmaja dari buku *Multiculturalisme Educations: A Teacher Guide To Linking Context, Process And Content* karya Hilda Hernandez, bahwa multikulturalisme adalah bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultural lagi.⁸ Berusaha untuk mengajak manusia untuk menerima perbedaan yang ada pada sesama manusia sebagai hal-hal yang alamiah (*Natural Sunnatullah*), makna sunatullah menurut Azyumardi Azra yaitu: Multikultural secara sederhana sebuah Negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya tidak ada satu negarapun yang mengadung hanya kebudayaan nasional tunggal, dengan demikian multiculturalisme merupakan sunatullah yang tidak dapat ditolak bagi setiap Negara-Bangsa didunia.⁹ menambah kesadaran pada mahasiswa akan keragaman (*Plralitya*), keselarasan (*Equality*), kemanusiaan (*Humanity*), keadilan (*Justice*), dan nilai-nilai demokrasi (*Democraton values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial. Menurut Ali Maksum: tujuannya membentuk "*Manusia Budaya*" dan menciptakan masyarakat-berbudaya (perperadapan).¹⁰

Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidak-toleranan (*Intorelable*) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama,

⁶ <http://file.upi.edu/Direktori/Multikultural.pdf.com>.

⁷ <http://www.idonbiu.com/2009/05/implementasi-pendidikan-multikultur.htm>

⁸ <http://my.opera.com/Putra%20Pratama/blog/show.dml/2743875.com>

⁹ Azyumardi azra, *Pendidikan Agama: Membangun Multikulturalime Indonesia*, Id Zakiyuddin Baidhowy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multi Kultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), VII.

¹⁰ Ali Maksum, Luluk Yunan ruhendi, *Paradikma Pendidikan*, Universiti, (Yogyakarta: IRCIsod, 2004), 190-192.

diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

4. Pengertian Multikultural dan Pendidikan Multikultural

Multikulturalisme berasal dari dua kata; multi (banyak/beragam) dan cultural (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti Keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami, adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Dengan upaya-upaya tersebut di atas, sebaiknya Hallain yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan integrasi nasional melalui revitalisasi gagasan (mutualisme, musyawarah dan mufakat, kesetaraan) dan nilai-nilai agama (kasih sayang, damai, keadilan dan persatuan) dalam ruang lingkup pergaulan sesama anak bangsa. Memang tidak mudah bagi bangsa yang pluralistik dan multikultural untuk menjaga integrasi nasional, namun hal tersebut tetap dapat dilakukan.

Istilah Multikulturalisme bukan sekedar pengakuan akan adanya kultur, atau budaya yang berjenis-jenis, tetapi pengakuan itu juga mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi, terutama yang berkaitan dengan *“The right to culture.”*

Kata “Multi” yang berarti plural, “kultural” yang berarti kultur atau aliran. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Menurut James A. Banks Banyak definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia-yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan-yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam *“Politics of Recognition”* (Azyumardi Azra: 2007).

Lawrence Blum mengungkapkan bahwa: Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Berbagai pengertian mengenai multikulturalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari Multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain.

Fenomena Multi Kultural di Indonesia telah cukup memberikan gambaran bahwa untuk merumuskan sebuah pola tindakan dan pendidikan multi kultural, pertama-tama perlu kesadaran untuk memandang dan memperlakukan orang lain (pendidikan) seperti layaknya memperlakukan diri sendiri. Malahan dalam paham Advaita Vedanta (*Monisme*) diterangkan bahwa manusia secara esensial sama, bukan secara fenomenan sama. Artinya, Advaita Vedanta sangat menyadari akan adanya perbedaan dan pluralisme. Karena itu perlu adanya kemauan bersama sebagai bagian dari komunitas multi kultural untuk mengaktualisasikannya dalam bentuk praksis dan tindakan nyata (Dr.James D.Adam, SE.MBA),¹¹

Adapun Pendidikan Multi Kultural antara lain:

- a. Andersen dan Cusher, Pendidikan Multicultural diartikan sebagai pendidikan mengenai kenegaraan kebudayaan.

¹¹ <http://www.google.co.id/search?q=pendidikan+multi+kultural&ie.com>

- b. Jams Bank, Sebagai pendidikan untuk *Peoplenof Color*, artinya: Pendidikan Mutikultural ingin mengesprorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugra Tuhan Sunnatullaoh).¹²
- c. Hilda Hernandezdialami oleh masing-masing: Pendidikan Multikultural sebagai perespektif realitas politik, sosial dan ekonomi yang dialami masing-masing individu dalam pertemuan manusia kompleks dan beragam secara kultur dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan genderetnisitas, agama, strata social, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam pendidikan.¹³
- d. Hilliard Pendidikan Multicultural adalah pengembangan dari kurikulum dan aktifitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang non Eropa.
- e. Muhaimin el ma'hady, Pendidikan Multicultural: tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia, secara keseluruhan (Global).¹⁴

Pendidikan Multikultural adalah Konsep, ide atau falsafah. Sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*Setof Believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis didalam membantu gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan individu dari in individu, kelompok maupun negara.

5. Pendidikan Multikultural di Beberapa Negara

Munculnya berbagai kelompok bangsa yang bermukim di negara-negara maju membentuk suatu kekuatan sendiri dan menurut hak-haknya sebagai warga baru. Dengan adanya kelompok-kelompok baru ini, muncullah paham nasionalisme baru yang tidak lagi berkonotasi etnis. Nasionalisme kultural mulai lahir menggantikan nasionalisme etnis.

6. Pendidikan Mutikultural dan Konsep Nasionalisme

Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan bhineka tunggal ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat

Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah: demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

¹² Choirul Mahfud, *Pendidika Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 167.

¹³ Hilda Hernandez, *Multikultural Education: A Teacher Guide to Unking context Perss, and Content* (New Jersey & ohio: Prentice) 11

¹⁴ Muhaimin, dalam tulisan "Multikultur-turalisme dan Pendidikan Multicultural, 2004) 3

Konsep negara-bangsa mempunyai dimensi yang baru bahwa pluralisme akan memperkuat nasionalisme yang positif. Konsep nasionalisme baru ini menghargai adanya pluralisme komunitas dengan berbagai jenis kebudayaan sekaligus memperkuat solidaritas dan rasa bersatu dari komunitas tersebut suku bangsa di dalam kehidupan global yang penuh persangan dan kerjasama.

7. Rumusan Multikulturalime menurut Rob. Reich

a. *Multikulturalime Deskriptif*

Multikulturalime Deskriptif: kenyataan sosial yang dikenal oleh pakar ilmu politik sebagai kenyataan prulalistik multikulturalime deskriptif. Tidak mengakui adanya suatu konsep mengenai yang disebut sesuatu yang baik (*Goud*). Sesuatu yang baik bergantung pada kepada nilai pluralistik dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran yang disebut tunggal tidak dikenal dalam konsep multi kulturalisme. Yang baik adalah yang dianggap benar oleh masyarakat.

b. *Multikulturalisme Normatif*

Multikulturalisme Normatif: berkaitan dengan dasar-dasar normal antara keterikatan seseorang dalam suatu negara bangsa. Artinya terdapat suatu ikatan moral dari anggota-anggota dalam batasan negara untuk melakukan suatu sebagaimana telah menjadi kesempatan bersama dalam kaitan dengan ini multi normatif merupakan suatu kritik sosial dalam membangun suatu wadah didalam pluralitas budaya yang ada dalam komunitas tersebut.¹⁵

8. Implementasi Pendidikan Multikultur Dunia Pendidikan

Uraian sebelumnya telah mempertebal keyakinan kita betapa paradigma pendidikan multikulturalime sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di antara keragamannya etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan di antara kita. Paparan di atas juga memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain.

Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalime di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan kesadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai.

Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta, jika mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu concern dari Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

¹⁵ <http://file.upi.edu/Direktori/Multikultural.pdf>. Com.

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik¹⁶.

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, dirasakan kita perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut.

Secara generik, Pendidikan Multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikanbersama.

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Pendidikan Multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
2. Pendidikan Multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
3. Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.
4. Pendidikan Multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.
5. Pendidikan Multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.¹⁷

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural dalam struktur sekolah adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin. Juga, harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, di antaranya mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkuat sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

¹⁶ <http://www.idonbiu.com/2009/05/implementasi-pendidikan-multikultur.html> Friday, May 15, 2009

¹⁷ <http://www.idonbiu.com/2009/05/implementasi-pendidikan-multikultur.html> Friday, May 15, 2009

Istilah “Pendidikan Multi Kultural” sering dipergunakan di dunia pendidikan sebagai suatu usaha sistematis dan berjenjang, memasukkan isu-isu seperti gender, hubungan antar agama, kelompok kepentingan, kebudayaan dan subkultur, serta bentuk-bentuk lain dari keragaman. Pada akhirnya pendidikan multi kultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman (*Teaching Diversity*). Pendidikan multi kultural menghendaki rasionalisasi etnis, intelektual, sosial dan pragmatis secara inter-relatif: yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralisme, dan saling menghargai semua orang.

Analisa: Pendidikan multi kultural merangkul perbedaan di antara siswa, berupaya membantu siswa belajar tanpa memandang dari kelompok mana mereka berasal, dan menjunjung keadilan sosial. Disusun atas dasar persamaan dalam kurikulum, hubungan antar guru dan murid, suasana sekolah, dan hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat.

Para Pendidik multi kultural mampu menggambarkan semua aspek dari proses pendidikan melalui lensa kritis yang memiliki apa yang siswa butuhkan dan pembelajaran siswa langsung pada pusatnya. Pendidikan multi kultural biasanya tergantung dari isi kurikulum, yang mungkin termasuk hubungan manusia; studi etnis atau kelompok budaya lain; pengembangan keahlian berfikir kritis; dan pengujian isu seperti rasisme, kekuatan, dan diskriminasi. Ketentuan pendidikan yang multi kultural mengapuskan para pendidik untuk:

1. Menempatkan siswa dipusat proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Menjunjung hak-hak asasi manusia dan mengormati perbedaan budaya.
3. Yakin bahwa semua siswa dapat belajar.
4. Mengetahui dan membangun sejarah kehidupan dan pengalaman dari keanggotaan kelompok budaya siswa.
5. Secara kritis menganalisa tentang penindasan dan kekuatan hubungan untuk memahami rasisme, seks, klasisme, dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan kecacatan, kaum homo, lesbian, para pemuda dan kaum lanjut usia.
6. Kritik sosial dalam kepentingan keadilan sosial dan persamaan sosial.
7. Berpartisipasi dalam aksi sosial kolektif untuk menjamin terjadinya masyarakat yang demokratis (Gollnick & Chinn, 2006: 357).

Pendidikan Multi Kultural ditujukan bag semua siswa tanpa memandang keanggotaan kelompok ras atau etnis mereka. Sayangnya, banyak para pendidik yang berfikir bahwa pendidikan ini hanya untuk siswa dari kulit berwarna, dan yakin bahwa siswa dari golongan kulit putih tidak perlu memperluas isu yang dapat menciptakan keributan dalam masyarakat (misalnya, rasisme dan diskriminasi) atau mengetahui tentang sudut pandang lain atau kelompok lain yang membantu menjelaskan konklusi yang berbeda yang dimiliki oleh setiap kelompok tentang sejarah, kejadian-kejadian, dan pokok masalah. Kebanyakan buku panduan sekarang ini berisi tentang perbedaan kelompok etnis dan ras, dan kebanyakan guru memasukkan informasi tentang kelompok lain dari yang ada dalam pelajaran, khususnya selama bulan yang telah ditetapkan untuk menjadi bulan masyarakat Amerika Afrika, Latin, atau sejarah wanita. Namun, di beberapa sekolah, perhatian terhadap multi kulturalisme dimulai dan berakhir mencicipi makna-makna khas daerah dan berpartisipasi dalam beragam festival etnis yang diadakan oleh para orang tua, yang hanya memberikan pemahaman yang dangkal tentang perbedaan. Pendidikan multi kultural, disisi lain, lebih efektif dengan mempersatukan perbedaan dan persamaan melalui kurikulum dan lingkungan sekolah.

C. Pendidikan Inklusi Gender

1. Pendidikan Inklusi

Pendidikan Inklusi adalah termasuk hal yang baru di Indonesia umumnya. Ada beberapa pengertian mengenai pendidikan inklusi, diantaranya adalah pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Dengan kata lain pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Pendidikan Inklusi tidak hanya menyangkut inklusi penyandang cacat. Sebagaimana ditekankan dalam dokumen Jomtien, terdapat banyak kelompok yang rentan akan eksklusi dari pendidikan, dan inklusi pada esensinya adalah menciptakan sistem yang dapat mengakomodasi semua orang. Kurikulum pendidikan inklusi menggunakan kurikulum sekolah reguler (kurikulum nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi) sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus, dengan pertimbangan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya. Modifikasi kurikulum dilakukan terhadap:

1. Alokasi waktu
2. Isi/ materi kurikulum
3. Proses belajar-mengajar
4. Sarana-prasarana
5. Lingkungan belajar, dan
6. Pengelolaan kelas.

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Pengelompokan anak berkebutuhan khusus dan jenis pelayanaannya, sesuai dengan Program Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Tahun 2006 dan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Tuna Netra
2. Tuna Rungu
3. Tuna Grahita: (a.l. Down Syndrome)
4. Tuna Grahita Ringan (IQ=50-70)
5. Tuna Grahita Sedang (IQ=25-50)
6. Tuna Grahita Berat (IQ<25)
7. Tuna Daksa
8. Tuna Laras (Dysruptive)
9. Tuna wicara
10. Tuna Ganda
11. HIV AIDS
12. Gifted: Potensi kecerdasan istimewa (IQ > 125) J. Talented: potensi bakat istimewa (Multiple Intelligences: language, Logico mathematic, Visio-spatial, Bodily-kinesthetic, Musical, Interpesonal, Interpersonal, Intrapersonal, Natural, Spiritual).
13. Kesulitan belajar (a.l Hyperaktif, ADD/ADHD, Dyspraxia/Baca, Dysgraphia/Tulis, Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/ Motorik)
14. Lambat Belajar (IQ=70-90)
15. Autis
16. Korban Penyalagunaan Narkoba
17. Indogo.

2. Pengertian Gender dan Pendidikan

Gender adalah sifat behavioral, kultural, dan psikologis yang biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu.¹⁸ Gender berorientasi pada dataran “peran” menjadi anak laki-laki atau perempuan.¹⁹

Pengertian Gender menurut para ahli, antara lain:

a. Mansour Fakih

Mansour Fakih, aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mendefinisikan gender sebagai konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dengan melihat: 1) segi biologis (sex, jenis kelamin); 2) segi social budaya (non-biologis)²⁰

b. Saparinah Sadli

Mendefinisikan gender sebagai: 1) sejumlah karakteristik psikologis yang ditentukan secara sosial dan berkaitan dengan adanya seks; 2) pembagian jenis kelamin yang didasarkan pada perbedaan seksual (biologis) termasuk di dalamnya karakteristik yang dianggap khas laki-laki dan perempuan.²¹

c. Nasaruddin Umar

Menurut Nasaruddin Umar, seorang pemerhati gender dari Universitas Islam hegeri Syarief Hidayatullah menyatakan: bahwa berkaitan dengan Islam, gender tidak hanya didefinisikan, namun juga diberikan penjelasan yang memadai mengenai bagai mana konsep gender itu berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, Nasaruddin mendefinisikan gender sebagai suatu prespektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan yang setara dihadapan Allah dalam hal tugas kemanusiaan dan hak-haknya.²²

Dalam gerakan Islam moderen, salah satu aspek yang berusaha ditonjolkan adalah pemahaman baru terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan kaum perempuan. Rif’at at-Tahthawi menyatakan bahwa kaum perempuan mesti memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Mereka harus memperoleh pendidikan agar dapat menjadi istri yang baik dan menjadi patner suami dalam kehidupan intelek dan sosial, juga agar dapat bekerja seperti laki-laki sesuai dengan batas-batas kesanggupan dan pembawaannya.²³

Guru adalah *By Nature* profesi Perempuan, dalam dekade-dekade terakhir abad 20 terdapat suatu kecendrungan semakin banyak perempuan memasuki profesi guru. Semula terdapat kekhawatiran mengenai tendensi ini ialah gejala feminisasi profesi akan pengaruh terhadap proses pendidikan.²⁴

Bias gender tersebut tentunya tidak beralasan, karena kita ketahui di dalam masyarakat moderen yang telah berdiferensiasi gender (mitos: profesi perempuan, puas dengan imbalan minim langkah-langkah demitologisasi: perempuan adalah guru alamia pertama, perempuan dan laki-laki harus memperoleh perlakuan,

¹⁸ Gene E, Linnda F, Donna M, *Mengajar dengan Senang*, (Jakarta:Pt. Indeks, 2008),73

¹⁹ Ahmad Mustain, *Penafsiran Tek Gender*, dalam majalah Nuansa Edisi III, (Jombang: An-Najiyah, 2001)1.

²⁰ Mansour Fakih, *Menggesaer Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996),7-8.

²¹ Saparinah Sadli, *Identitas Gender dan Peran Gender*, dalam Omas Ihroni, (ed), *Kajian Wanita dalam Pengembangan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995),70.

²² Arifin Riduan, Mengutip Nasaruddin. "Gender Dalam Prespektif Sosial budaya" *Paramedia: Jurnal Komunikasi dan Keagamaan*, (Surabaya: Pusat Penelitian IAIN, vol.6 No,2 April (2005), 134.

²³ www.psg.or.id/kesetaraan gender, emansipasi, feminisme, disuting dari tulisan Prof. Dr. Nasution Umas, MA. Majalah taubah edisi Maret 2006.

²⁴ Mary Hatwood Futrell, president Education internasional, menegaskan “We are both educators and laborers.” *Highlights*),11.

kesempatan, dan penghargaan yang sama).²⁵ Pendidikan inklusi menghapus bias gender, adapun bias-bias gender:

Bias seputar agama Islam, Bias laki-laki dalam penafsiran kekhususan-kekhususan yang diperuntukan laki-laki antara lain (menafikan perempuan): Suwami setingkat lebih tinggi diatas istri al-Baqorah (2):228., laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan (05(4)24), tetapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama dan banyak bias-bias mendiskriminasikan perempuan yang perlu diluruskan.²⁶ Perempuan dianggap sebagai elemen kedua yang tidak bias duduk setara dengan laki-laki dalam berbagai dimensi sosial lebih spesifik dalam pendidikan.²⁷

Hak asasi manusia dalam semua bidang pekerjaan tidak dapat dibenarkan membeda-bedakan berdasarkan gender. perempuan yang memasuki profesi guru harus mendapat sama hak dan perlindungan kerja yang sama dengan apa yang diperoleh oleh kaum pria. Dalam hal ini belum dapat dibuktikan dengan riset bahwa kemampuan dan prestasi kerja guru perempuan lebih rendah dari guru laki-laki.²⁸ Dalam pendidikan inklusi gender, perempuan dan laki-laki sama dalam mendapatkan hak pendidikan dan tidak bisa dibeda-bedakan. Menurut tes kecerdasan menunjukkan tidak ada perbedaan dalam kecerdasan umum antara jenis jenis kelamin. Laki-laki cenderung mempunyai pengaruh besar dari belahan otak kanan (menguasai performa yang lebih baik tes visualisasi ruang dan prestasi lebih tinggi dalam matematika dan ilmu pengetahuan alam), sedangkan perempuan kecenderungan pengaruh besar dari belahan otak kiri (menguasai berbicara, membaca dan menulis).²⁹ Meskipun duduk dalam kelas sama, membaca buku sama, mendengarkan guru yang sama, siswa laki-laki dan perempuan menerima pendidikan yang berbedah.³⁰ Sebenarnya pada saat masuk sekolah, siswa perempuan memiliki tampilan yang sama atau lebih baik dari siswa laki pada setiap ukuran prestasi yang dicapai akan tetapi pada saat mereka lulus dari perguruan tinggi atau akademik, siswa perempuan tertinggal dibelakang. Kesenjangan ini disebabkan oleh sosialisasi gender di dalam sekolah dan adanya kurikulum yang secara tersembunyi bias gender (gender bias-hidden curriculum) yang membuat siswa perempuan kurang merasakan perubahan di dalam kelas.³¹ Secara universal pekerjaan pengasuhan, anak dan pemeliharaan rumah, dianggap sebagai pekerjaan perempuan, sedangkan pencarian nafkah dianggap pekerjaan laki-laki. Dengan demikian kata lain laki-laki melakukan tugas-tugas yang memerlukan fisik, sedangkan perempuan tidak memerlukan fisik dan dapat dilakukan sekitar rumah.³²

Dalam Agama Islam, Pendidikan Inklusi Gender tidak dibeda-bedakan dengan alasan apapun, selama perempuan tidak keluar dari kodratnya. Tanpa mempertimbangkan apapun jenis kelaminnya, dinyatakan bahwa yang membedakan di antara mereka hanyalah kualitas dan prestasi taqwanya, (artinya:

²⁵ H.A.R Tilaar, *Membebahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),94.

²⁶ *Perempuan dalam Pasung Bias Laki-laki* (Yogyakarta: Kis, 2003), 286.

²⁷ Suhardi, *Denaskulinisasi Peandidikan Pesantren: Mengagas Pendidikan Pesantren Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Sumenep: Edukesen, 2010),70.

²⁸ H.A, R, Tilaar, *Membenai Pendidikan Nasional*, 99.

²⁹ Gene E, Linnda F, Donna M, *Mengajar dengan Senang*, 73.

³⁰ D. Sadker and M. sadker, *Failing at Fairness: How Our Schools Cheat Girls* (Toronto: Simon and Schuster, 1994)

³¹ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multi Kultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 96.

³² Abd. DJamil, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 9-10.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS Al-Hujurat {49}:13).

3. Beberapa Konsep Inti Pendidikan Inklusi berdasarkan Dokumen Salamanca, antara lain:

- a. Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya.
- b. Perbedaan itu normal adanya.
- c. Sekolah perlu mengakomodasi semua anak.
- d. Anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- e. Partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi inklusi.
- f. Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi.
- g. Kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya.
- h. Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat.
- i. Inklusi itu penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh.
- j. Sekolah inklusi memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusi.
- k. Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan.

Guru harus terpusat pada anak, kurikulum harus fleksibel, masyarakat dan orang tua harus dilibatkan. Pendidikan Inklusi: Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, jender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/AIDS dll. Adapun hambatan-hambatan pendidikan inklusi gender berserta pendekatannya sebagai berikut:

a. Hambatan-hambatan belajar itu Teridentifikasi sebagai berikut:

1. Hambatan dalam kurikulum
2. Pusat pembelajaran
3. Sistem pendidikan
4. Konteks sosial yang lebih luas
5. Hambatan sebagai akibat dari kebutuhan siswa.

b. Pendekatan-pendekatan utama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut:

1. Setiap pusat pembelajaran dilengkapi dengan struktur pendukung yang terdiri dari guru, tetapi juga dilengkapi dengan sumber daya masyarakat dan layanan tenaga ahli. Oleh karena itu pada hakikatnya berbasis masyarakat.
2. Adanya pusat dukungan lokal untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru, bukan kepada individu siswa pada umumnya.
3. Orang tua, guru, siswa (atau para pembelanya), dengan kata lain semua stakeholder utama, akan dilibatkan dalam manajemen, perencanaan

kurikulum, pengembangan sistem pendukung, dan dalam proses belajar dan mengajar.

4. Kapasitas pendanaan, kepemimpinan dan manajemen dikembangkan dengan cara yang berkesinambungan.

D. Kesimpulan

Pendidikan Multikultural sebagai wahana pengembangan pendidikan yang sangat penting, terutama dalam manajemen pendidikan. Karena pendidikan ini melibatkan aktivitas orang tua, kepala sekolah, guru, bangun fisik sekolah, proses belajar mengajar, perlakuan terhadap murid, kesempatan terlibat dalam kegiatan kelompok belajar memperlakukan perbandingan dari berbagai macam kultur dalam pendidikan bermuatan multikultural.

Pendidikan Inklusi Gender tidak memperkerdil minat belajar pendidikan bagi perempuan sebab:

1. Pendidikan inklusi bukan merupakan suatu strategi yang terpisah dari sistem pendidikan Nasional untuk dipergunakan dalam mendidik anak penyandang cacat maupun gender.
2. Pendidikan inklusi ditujukan untuk mengubah sistem sekolah, bukan untuk memberi label kepada individu atau kelompok anak tertentu ataupun untuk mengubahnya termasuk gender.
3. Pendidikan inklusi gender lebih luas daripada persekolahan.
4. Pendidikan inklusi gender merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas untuk menciptakan suatu Masyarakat yang Inklusi.

Dengan demikian, Pendidikan Multicultural dan pendidikan inklusi gender mempunyai korelasi tujuan, menjunjung tinggi eksistensi dan urgensi pendidikan, tanpa ada yang menafikan karena itu natural (Sunatullah).

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Agama: Membangun Multikulturalisme Indonesia, Id Zakiyuddin Baidhowy, Pendidikan Agama Berwawasan Multi Kultural* (Jakarta: Erlangga, 2005)
- Baidhowy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multi Kultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005)
- DJamil, Abd. *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Fakih, Mansour. *Menggesaer Konsep Gender dan Tranformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Gene E, Linnda F, Donna M, *Mengajar Dengan Senang*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008),
- Hefner, Robert, *Introduktion: Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapur, and Indonesia*, (Honolulu: University of Hawai'i Perss, 2001)
- Hernandez, Hilda. *Multikultural Education: A Teacher Guide to Unking context Perss, and Content* (New Jersey & Ohio: Prentice)
- <http://www.idonbiu. /2009/05/implementasi-pendidikan-multikultur, com. html>
- <http://my.opera. /Putra%20Pratama/blog/show.dml/2743875, com>
- <http://www.idonbiu.com/2009/05/implementasi-pendidikan-multikultur.html> Friday, May 15, 2009
- Kesetaraan gender, Emansipasi, Feminismie, disuting dari tulisan Prof. Dr. Nasution Umas, MA. *Majalah Taubah*, Ediisi Maret 2006.
- Maksum, Ali. Luluk Yunan ruhendi, *Paradikma Pendidikan*, Universiti, (Yogyakarta: IRCIsod, 2004)
- Mary Hatwood Futrell, President Education Internasional, menegaskan “*We are Both Educators and Laborers. Highlights*”.
- Mustain, Ahmad. *Penafsiran Tek Gender*, dalam *Majalah Nuansa* Edisi III, (Jombang: An-Najiyah, 2001)
- Muhaimin, dalam tulisan "Multikultur-Turalisme dan Pendidikan Multicultural, 2004)
- Riduan, Arifin. Mengutip Nasaruddin. "Gender Dalam Prespektif Sosial Budaya" *Paramedia: Jurnal Komunikasi dan Keagamaan*, (Surabaya: Pusat Penelitian IAIN, vol.6 No,2 April (2005),

Sadli, Saparinah. *Identitas Gender dan Peran Gender*, dalam Omas Ihroni, (ed), *Kajian Wanita dalam Pengembangan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995)

Suhardi, *Denaskulinisasi Peandidikan Pesantren: Mengagas Pendidikan Pesantren Berbasis Kesetaraan dan keadilan Gender*, (Sumenep: Edukesen, 2010)

Sadker and M. Sadker, *Failing at Fairness: How Our Schools Cheat Girls* (Toronto: Simon and Schuster, 1994)

Tilaar, H.A.R. *Membebahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

_____. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Trasformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 2002).